

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986.
- Achmad Sudiro, Oktaria Aridika Putri, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2023).
- Ahmadi Miru, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Alan J. Boulton, 2002, Struktur Hubungan Industrial di Indonesia Masa Mendatang, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta.
- Aloysius Uwiyono, et al., 2014, Asas-asas Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amran Basri, 2006. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Indonesia, Fakultas Hukum Tjut Nyak Dhien, Medan.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011.
- Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji.
- Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1987).
- Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Imam Syahputra, 2000. Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Havarindo. Jakarta.
- J.Satrio, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mulyadi S, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2012).
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. (Kencana. Jakarta : 2008).
- R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 1999.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000).
- Sehat Damanik. 2005. Hukum Acara Perburuhan; Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Disertai Contoh Kasus. Jakarta: DSS Publishing.

- Sentonorejo Kartonegoro, 2001, Pengupahan Teori, Hukum dan Management Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta.
- Sentosa Sembiring, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2005).
- Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet ke-3, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Soedarjadi, 2008. Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987.
- Timmer, P., W. Falcon, and S. Pearson, 1983, Food Policy Analysis, John Hopkins University Press, Baltimore, USE.
- Warassih, Esmi. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional." Gema Keadilan 5.1 (2018).
- Zaeni Asyhadi. 2008. Hukum Kerja. Jakarta. Rajawali Pers.
- Zaeni, Hukum Kerja, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018.

**B. Jurnal:**

- Hardyati, Desty Puteri, et al. "Pemenuhan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Di Masa Bonus Demografi." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9.12 (2023).
- Institut Ketenagakerjaan Indonesia. "Studi Kasus: Penurunan Upah dan Pembaharuan Perjanjian Kerja pada Pekerja Pabrik di Jabodetabek." Lembaga Penelitian Hukum Ketenagakerjaan, 2018, Jakarta.
- Joshua Evandeo Irawan dan Dwi Foni Yunita Nur Asyah, "Juridical Analysis of "Agile Working" from Indonesia's Positive Labor Law's Point of View", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23, No. 2, 30 Juni 2023.
- Kaka, Angelia Maya Saputri. "Tinjauan Yuridis Tentang Formulasi Pengupahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan." Novum: Jurnal Hukum 3.3 (2016).
- Maulinda Silalahi, 2006, Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Pekerja/Buruh Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Serta Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keadilan Antara Pekeja/Buruh, Tesis, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Megarani Arsyi Andini, S.H, 2017, Prinsip Pengawasan Hubungan Kerja Di Bidang Pengupahan Dalam Rangka Perlindungan Pekerja/Buruh, Jurnal Hukum, Universitas jember.
- Prasetyo, Yoko, and Ane Permatasari. "Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019." Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK) 2.1 (2020).

- Rahman Halim, Aji. "Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Journal Presumption of Law* 3.2 (2021).
- Rosifany, Ony. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4.2 (2020).
- Soleh, Ahmad. "Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6.2 (2017).
- Wirawan, I. Wayan Gde. "Dilematika Kebijakan Upah Minimum Dalam Pengupahan di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 6.1 (2016).
- Wirawan, Wayan Gde. *Ironi upah minimum dalam industri pariwisata*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yetniwati, Y. "The Legal Arrangement of Wage Protection Based on the Principle of Legal Certainty." *Jurnal Dinamika Hukum* 16.2 (2016).

### C. Hasil Penelitian

- Juliani Rizki, "Penyelesaian Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pengurangan atau Pemotongan Upah Secara Sepihak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Putusan Nomor : 49/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn)". Skripsi, Medan: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2020.
- Mega Surya Mahardika, "Prinsip Perlindungan Hukum Pekerja atas Pengurangan Upah di Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Kajian Konstitusi*, Volume 01 Issue 02 (2021), hal. 118 – 135.
- Salaztwina Nurjayanty, "Akibat Hukum Pemotongan Upah Pekerja Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pengusaha Waroeng Spesial Sambal (WSS) Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol.1, No.4 November 2023.

### D. Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
- Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) No. 98 tentang Prinsip Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899).

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

**E. Website/Internet:**

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/> diakses pada 04 November 2024.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-penurunan-gaji-dan-penyelesaiannya-lt6089cdf22c2bb/> diakses 09 oktober 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Pemerintah: Aturan Perjanjian Kerja dan Alih Daya dalam UU Cipta Kerja Lindungi Buruh”. <https://testing.mkri.id/berita/pemerintah:-aturan-perjanjian-kerja-dan-alih-daya-dalam-uu-cipta-kerja-lindungi-buruh-20123> diakses pada 20 November 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Pemerintah: Aturan Perjanjian Kerja dan Alih Daya dalam UU Cipta Kerja Lindungi Buruh”. <https://testing.mkri.id/berita/pemerintah:-aturan-perjanjian-kerja-dan-alih-daya-dalam-uu-cipta-kerja-lindungi-buruh-20123> diakses pada 20 November 2024.

Tempo.co Jakarta, <https://www.tempo.co/ekonomi/diduga-potong-upah-dan-phk-sepihak-serikat-buruh-tuntut-hal-ini-ke-produsen-sepatu-adidas-189544> diakses pada 05 Januari 2025.

**F. Kamus**

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 06 November 2024.

W.J.S Poerwadarminta 2004. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.